

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 adalah merupakan kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan LKJIP juga dalam rangka penyelenggaraan *good governance* serta memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan bebas KKN, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan kondisi, potensi, perkembangan dan permasalahan serta tatanan masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan didasari dengan keinginan luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pandanarum Tahun 2018 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018 dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya.

LKJIP ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I : PENDAHULUAN.....	3
A. Gambaran Umum	3
B. Permasalahan dan Isu Strategis.....	5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	7
B. Perjanjian Kinerja	7
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV : PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja Instansi pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Kecamatan Pandanarum sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Pandanarum Tahun Anggaran 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau tingkat capaian kinerja serta kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1. Kondisi Geografis Dan Demografis Kecamatan

Kecamatan Pandanarum merupakan salah satu dari dua kecamatan yang baru efektif berjalan pada pertengahan tahun 2004, sedangkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

Kecamatan Pandanarum terletak 60 km dari ibukota Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 58,53 km², terdiri dari 8 desa, dan berada pada ketinggian rata-rata 789 m dari atas permukaan laut.

Adapun batas-batas Kecamatan Pandanarum adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah timur : Kecamatan Kalibening
- Sebelah selatan : Kecamatan Punggelan
- Sebelah barat : Kabupaten Purbalingga

Perincian jumlah dusun, RW dan RT masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.

Tabel 1.1.
Jumlah Dusun, RW dan RT pada Kecamatan Pandanarum

NO	Desa/ Keluarga	JUMLAH			KK	PENDUDUK
		DUSUN	RW	RT		
1	Sinduaji	4	4	9	553	1.910
2	Pandanarum	3	3	14	884	3.301
3	Beji	4	5	14	654	2.801
4	Pringamba	5	6	16	702	2.460
5	Pasegeran	5	6	19	953	3.049
6	Pingitlor	4	4	14	720	2.386
7	Lawen	5	9	25	1.344	4.579
8	Sirongge	6	8	22	826	3.601
Jumlah		36	45	133	6.636	24.087

- Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pandanarum

Jumlah penduduk Kecamatan Pandanarum kondisi sampai dengan akhir bulan Desember 2018 adalah 24.047 jiwa, yang meliputi laki-laki 12.161 jiwa dan perempuan 11.926 jiwa, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 6.636 dengan perincian perdesa sebagaimana tersebut pada Tabel 2.

Sedangkan pembagian luas wilayah Kecamatan Pandanarum terdiri atas tanah sawah irigasi 676 Ha dan sawah non irigasi 288 Ha sedangkan tanah bukan sawah 4.767 Ha dan Lahan Non Pertanian 410 Ha.

2. Profil Kecamatan Pandanarum

• Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas Kecamatan Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kerja Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Pandanarum mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;



- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan Fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Struktur Organisasi Kecamatan**

Kecamatan Pandanarum memiliki 18 (delapan belas) Karyawan terdiri dari 8 (delapan) Pejabat Struktural, 7(tujuh) Fungsional umum dan 3 (tiga) THL.

B. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Pandanarum menjadi garda terdepan pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, wajah kabupaten Banjarnegara dilihat dari pelayanan Kecamatan Pejawaran kepada masyarakat. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat memberikan ruang yang lebih terbuka kepada kecamatan untuk melakukan percepatan pelayanan masyarakat melalui PATEN, baik melalui perijinan dan non perijinan.

Terkait hubungan Kecamatan dan Desa, Camat dapat mendorong desa untuk melakukan percepatan pembangunan, melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Kebijakan Pembangunan ke depan harapannya benar-benar aspiratif, proses perencanaan pembangunan yang berjenjang dari tingkat Dusun, Desa kemudian ke Kecamatan sampai ke Kabupaten melalui musrenbang yang diwadahi dalam dokumen RPJMD dapat dijadikan rujukan utama dalam perencanaan pembangunan. Harapannya, pembangunan berkesinambungan dan berdasarkan skala prioritas.

Aspek strategis pada Kecamatan Pandanarum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat;
3. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;
4. Adanya apatisme, rendahnya partisipasinya, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial, ekonomi, dan Budaya dalam Musrenbang;
5. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
6. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam melakukan implementasi (Tidak Sesuai Juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (Penggulangan Kemiskinan, Kesehatan, dan rendahnya kesadaran aparatur Pemerintan Desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Kecamatan Pandanarum merupakan salah satu unsur perangkat daerah dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya penyusunan perencanaan strategis berpedoman kepada Visi Bupati/Wakil Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 hasil pemilihan langsung, yaitu “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

1. Misi

Untuk menjalankan visi tersebut dijabarkan melalui misi- misi :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintah yang baik;
3. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dari tugas dan fungsi tersebut maka Kecamatan Pandanarum Kab. Banjarnegara mendukung **Misi ke 2 (dua)** yaitu Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintah yang baik dan **Misi ke 4 (empat)** yaitu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

B. PERJANJIAN KINERJA



Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 sebagaimana telah di reviu dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2018.

Penjelasan dari perjanjian kinerja Kecamatan Pandanarum tahun 2018 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN, dengan indikator Kinerja sebagai berikut :
 - b. Persentase Usaha yang berijin ditargetkan 5 %
 - c. Persentase non Perijinan yang terlayani 100 %
2. Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah PAD, dengan Indikator Kinerja
 - a. Persentase Pelunasan PBB dengan target 100 %
3. Sasaran stragetgis peningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan indikator Kinerja :
 - a. Persentase Desa yang memiliki BUMDesa dengan target 75 %
4. Sasaran Strategis Meningkatnya tertib administrasi Desa, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Desa yang tertib Administrasi Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100 %
5. Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel :
 - a. Nilai SAKIP dengan target nilai B.
6. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dengan indikator Kinerja
 - a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target nilai 80.

Secara lengkap, Penjanjian Kinerja Tahun 2018 disajikan pada dokumen terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pandanarum adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Pandanarum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pandanarum tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja tahun 2018, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Pandanarum serta dilakukan analisis capaian kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PANDANARUM TAHUN 2018

Salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Akan tetapi, kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Penilaian Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik	
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	
3.	66% ≤ 75%	Sedang	



4.	$51\% \leq 55\%$	Rendah	
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pandanarum Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya serta membandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis. Adapun capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1:	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
-------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja melalui 2 indikator kinerja sasaran, adapun realisasi dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target Akhir Renstra 2022 (%)	Capaian Kinerja 2018 terhadap target Renstra (%)
1. Persentase usaha yang berijin	7 %	12,46%	178 %	7	178
2. Persentase non perijinan yang terlayani	100%	289,76 %	289,76%	100	289,76

Di Kecamatan Pandanarum terdapat 337 usaha dan direncanakan dalam 5 (lima) tahun usaha yang berijin sebanyak 131 usaha dan pada tahun 2018 direncanakan 25 usaha yang berijin atau 7% dan dapat terealisasi 42 usaha atau 12,46%, Sedangkan untuk non perijinan dari 2.629 dokumen dapat terealisasi 7.618 dokumen atau tercapai 289,76%.

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pencapaian sasaran strategis 1 ini apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya dapat kami gambarkan sebagai berikut :



Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
- Persentase Usaha yang berijin	10,98%	13,35%	23,44%	12,46%
- Persentase Non Perijinan yang terlayani	100%	100 %	100 %	289,76%

a. Persentase Usaha yang berijin

Perbandingan capaian kinerja cenderung meningkat, tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan namun tidak signifikan dari 23,44% di Tahun 2017 menjadi 12,46% namun demikian capaian tersebut masih memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

b. Persentase Non Perijinan yang terlayani

Pada tahun 2018 capaian kinerja non perijinan yang terlayani mengalami peningkatan yang cukup tinggi atau sangat signifikan yaitu sebesar 289,76% atau mengalami peningkatan sebesar 189,76% dari tahun 2017.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung antara lain :

1. Mekanisme perijinan IUMK yang memungkinkan pemohon untuk lebih sederhana dalam pengajuan ijin;
2. Kesadaran pemohon ijin dalam melakukan permohonan perijinan yang memudahkan lebih cepatnya dokumen perijinan diterbitkan;
3. Pemindehan proses pendaftaran dan rekam data kependudukan (KK dan KTP) ke kecamatan yang memudahkan pemohon sehingga pemohon tidak harus datang ke Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara;
4. Kerjasama dengan pemerintah desa berkaitan dengan sosialisasi dan fasilitasi kepada pemohon dalam pemenuhan kecukupan dokumen permohonan non perijinan sehingga memudahkan dan mempercepat proses terbitnya dokumen non perijinan.

Namun demikian masih terdapat kendala yaitu : sebagian masyarakat yang mempunyai usaha dalam mengurus perijinan hanya jika ada kepentingan dengan pihak perbankan.

Solusi : Diberi pemahaman kepada masyarakat bahwa perijinan usaha itu sangat penting dalam memulai usaha.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: dalam pencapaian sasaran strategis 1, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.130.500,- atau 0,66% Realisasinya yaitu sebesar Rp. 19.869.500,- atau sebesar 99,34 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,-.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja



Program/Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pandanarum untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase usaha yang berijin dan persentase non perijinan yang terlayani adalah program Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : Asistensi PATEN , dan Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan.

Sasaran 2 :	Meningkatnya jumlah PAD
--------------------	--------------------------------

Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah PAD melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan terealisasi kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah 8 desa. Jumlah data baku PBB yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 321.692.628,- . Adapun realisasi indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target Akhir Renstra 2022 (%)	Capaian Kinerja 2018 terhadap target Renstra (%)
Persentase Pelunasan PBB	100	100	100	100	100

Indikator sasaran strategis 2 dapat tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 100 %. Dari pagu PBB Rp.321.692.628,- dapat terbayar sebelum waktu yang ditetapkan Sehingga Kecamatan Pandanarum memperoleh juara 2 Kecamatan Lunas Tercepat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Baku Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan Rp.750.000.000,-

Terhadap target jangka menengah yang telah disebutkan dalam dokumen renstra capaian pada tahun 2018 dapat dikatakan memenuhi target dengan capaian 100%.

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pencapaian sasaran strategis 2 ini apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya dapat kami gambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
Persentase pelunasan	100%	100%	100%	100%

- Persentase tunggakan PBB	0 %	0 %	0 %	0%
- Data Jumlah baku PBB	22.572	22.572	22.608	22.621

Secara kuantitatif capaian kinerja dari tahun ke tahun terdapat kecenderungan tren yang stabil atau dilunasi tepat waktu dengan jumlah Wajib Pajak (WP) bertambah setiap tahunnya, dapat terealisasi 100%,

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja telah tercapai dengan rata-rata capaian 100%

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung antara lain :

1. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik.
2. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas.
3. Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk taat membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
4. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyetoran PBB.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebesar Rp. 30.868.000,- atau 100% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 30.868.000.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program/Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pandanarum untuk mendukung keberhasilan pencapaian indicator kinerja Persentase Pelunasan PBB adalah pelaksanaan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :Intensifikasi Pajak Daerah Outputnya berupa : Pelunasan PBB Tahun 2018, Monitoring Evaluasi Penyetoran PBB, Pembayaran honorarium Tim Intensifikasi PBB

Sasaran 3 :	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
--------------------	--

Sasaran Strategis meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa yang memiliki BUMDES, Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni dan Persentase Kepemilikan Jamban Sehat. Adapun mengenai target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target Akhir Renstra 2022 (%)	Capaian Kinerja 2018 terhadap target
1. Persentase Desa yang memiliki	75	87,5	116,66	100	87,5
2. Persentase Penurunan RTLH	7	13,73	196,14	7	196,14
3. Persentase Kepemilikan Jamban Sehat	5	6,25	125	5	125

Pada Indikator Kinerja Persentase BUMDes dari target 75% atau 6 BUMDes dapat teralisasi 87,5% atau 7 BUMDes atau tercapai 116,66%

Desa yang memiliki Bumdes adalah sebagai berikut :

1. Desa Pringamba bergerak di usaha Pamsimas dan Gedung Olahraga
2. Desa Beji bergerak di usaha Pengelolaan Gedung dan UMKM
3. Desa Pasegeran bergerak di Simpan Pinjam, Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Penggemukan sapi.
4. Desa Lawen Bergerak di usaha Simpan Pinjam dan Ternak Kambing
5. Desa Sirongge bergerak di usaha penyertaan modal
6. Desa Sinduaji bergerak di usaha Pengemukan Sapi
7. Desa Pandanarum bergerak di usaha Pengemukan Sapi dan Perdagangan

Di Kecamatan Pandanarum terdapat RTLH 1621 yang belum dibangun namun dalam dalam tahap awal direncanakan 1143 RTLH namun dalam 5 tahun kedepan direncanakan 400 RTLH yang dibangun. Pada tahun 2018 direncanakan 7% atau 80 RTLH dan dapat terealisasi 13,74 % atau 157 RTLH atau mencapai 196,14%.

Dari 5682 rumah di Kecamatan Pandanarum sampai dengan 2017 yang memiliki jamban sehat sebanyak 1771 rumah dan yang belum 3911, namun untuk 5 tahun kedepan direncanakan terbangun 400 unit jamban sehat. Pada tahun 2018 direncanakan 80 unit atau 5 % terealisasi 100 unit yang terbangun atau 6,25% atau tercapai 125%.

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Indikator sasaran 3 apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
Persentase Desa yang memiliki BUMDes	-	-	50 %	87,5 %

Persentase Penurunan RTLH				13,73%
Persentase Kepemilikan Jamban Sehat				6,25%

Secara kuantitatif capaian kinerja Persentase Desa yang memiliki BUMDes meningkat, sedangkan Persentase penurunan RTLH dan Persentase Kepemilikan Jamban sehat belum dapat dibandingkan karena Indikator Kinerja itu baru ada di tahun 2018.

Keberhasilan capaian kinerja didukung antara lain :

1. Keinginan atau motivasi beberapa Pemerintahan Desa dalam rangka mengalokasikan anggaran guna meningkatkan kemandirian desa melalui BUMDes.
2. Dukungan Pendanaan dalam rangka pembangunan RTLH dari berbagai sumber seperti DD, APBD, Bantuan Keuangan Provinsi dan sumber pendanaan lainnya.
3. Koordinasi dengan lintas sektoral dengan puskesmas dalam rangka pembinaan dan pendampingan hidup sehat yang diwujudkan dalam pembangunan jamban sehat yang di dukung oleh Pemerintah Desa guna memberikan edukasi pentingnya lingkungan sehat.

Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 3 (tiga) adalah :

1. Pengelolaan bidang usaha Bumdes belum maksimal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat warga
2. Bumdes belum sepenuhnya menjadi alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai macam jenis potensi yang ada di desa.
3. Ada sebagian Desa yang enggan untuk mengalokasikan Sebagian Dana Desa untuk membantu warga masyarakat yang tidak memiliki rumah tidak layak huni karena lebih banyak mengakomodir usulan kegiatan infrastruktur. Hal ini menjadi hambatan untuk penurunan jumlah rumah tidak layak huni.
4. Kesadaran warga masyarakat dalam kepemilikan jamban sehat masih sangat minim, pada beberapa wilayah masih dijumpai masyarakat yang belum mempunyai jamban sendiri malah di sungai.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untk mencapai target tahun selanjutnya antara lain adalah :

1. Pembentukan Bumdes Gabungan antara beberapa desa untuk lebih memaksimalkan kinerja Bumdes.

2. Mengoptimalkan bidang usaha dengan menggali potensi lokal masyarakat desa.
3. Menghimbau Desa di RPJMDesa nya dimasukkan program Bumdes.
4. Melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran sehingga mengakomodir pembangunan RTLH dan Jamban Sehat.

Analisis Efisiensi Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 3terdapat efisiensi sebesar Rp.734.000,- atau sebesar 0.74% dari anggaran sebesar Rp. 104.000.000,- terealisasi sebesar Rp.103.266.000,- atau sebesar 99,26%.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pandanarum untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Desa yang memiliki BUMDes, Persentase Penurunan RTLH dan Persentase kepemilikan jamban sehat pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Pemberdayaan Kecamatan.

Sasaran 4	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud dilakukan pengukuran menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, adapun realisasi indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target Akhir Renstra 2022 (%)	Capaian Kinerja 2018 terhadap target Renstra (%)
Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	100	100	100	100	100

Realisasi kinerja pada sasaran 4 yang telah ditargetkan dalam Tahun 2018 tercapai dengan rata-rata capaian 100 %. Capaian tersebut sudah memenuhi target tahun 2018 dibuktikan di Kecamatan Pandanarum lomba

administrasi desa tingkat Kabupaten ada desa yang mendapat Juara 2 (Desa Beji). Berdasarkan amanat Permendagri 47 Tahun 2016, bahwa administrasi desa meliputi : Administrasi Umum (9 buku), Administrasi Penduduk (5 buku) , Administrasi Keuangan (5 buku), Administrasi Pembangunan (4 buku) dan Administrasi Lainnya (3 buku) . total berjumlah 26 buku. Berdasarkan hasil monitoring pembinaan administrasi desa tahun 2018, desa-desa di kecamatan Pandanarum sebagian besar sudah mengerjakan buku administrasi desa sehingga perlu ditingkatkan kembali agar menjadi lebih baik .

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Capaian kinerja diatas apabila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018
Persentase desa yang tertib administrasi desa	%	%	100 %	100 %

Secara kuantitatif capaian kinerja cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini menunjukkan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa sudah baik.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung antara lain :

1. Kinerja aparatur yang baik
2. Pembinaan ke desa berjalan maksimal
3. Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa

Analisis Efisiensi Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 4 terdapat efisiensi sebesar Rp.734.000,- atau sebesar 0.74% dari anggaran sebesar Rp. 104.000.000,- terealisasi sebesar Rp.103.266.000,- atau sebesar 99,26%.

Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran “ Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa ” dicapai melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dengan outputnya berupa: Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa

Sasaran 5:	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel
-------------------	--

Pemerintahan yang akuntabel diwujudkan dengan kesinambungan antara dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evalausi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Keseluruhan unsur tersebut dilakukan evaluasi secara keseluruhan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sebagai pelaksana dalam mengawal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penilaian mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis. Adapun kriteria hasil evaluasi terlihat pada tabel berikut:

Tabel
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
1	AA	>85 -100	Memuaskan
2	A	>75 – 85	Sangat Baik
3	B	>65 – 75	Baik
4	CC	>50 – 65	Cukup Baik
5	C	>30 – 50	Agak Kurang
6	D	0 – 30	Kurang

Penilaian dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dari keseluruhan aspek diatas, Kecamatan Pandanarum berdasarkan dokumen Renstra 2017 - 2022 menetapkan indikator kinerja sasaran yaitu terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dengan 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP dengan target nilai Kategori B (Baik) dengan nilai pada rentang lebih besar 65 sampai dengan 75. Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi dokumen SAKIP Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target Akhir Renstra 2022	% Capaian Kinerja 2018 terhadap target Renstra
Nilai SAKIP	B	CC	80,49	B	80,49

Penilaian yang telah dilakukan menetapkan bahwa nilai yang diperoleh Kecamatan Pandanarum sebesar 52,32 dengan rincian hasil evaluasi pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai Absolut	Nilai yang diperoleh	%
1	Perencanaan Kinerja	30	17,01	56,69
2	Pengukuran Kinerja	25	14,06	56,25
3	Pelaporan Kinerja	15	10,24	68,25
4	Evaluasi Internal	10	2,06	20,60
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	8,96	44,79
Hasil Evaluasi		100	52,32	52,32

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena pada Perjanjian Kinerja sebelumnya indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2018 sehingga belum dilakukan pengukuran/penilaian.

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Dengan perolehan nilai tersebut, Kecamatan Pandanarum masih belum optimal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada beberapa aspek yaitu:

1. Dokumen Renstra 2011 – 2107 belum memuat tujuan yang ditetapkan dengan dilengkapi indikator, tujuan yang disertai target keberhasilan, kinerja sasaran dan target tahunan belum tersajikan;
2. Kualitas Renstra 2011 – 2017 belum menyajikan indikator outcome dan output yang baik serta target kinerja belum ditetapkan dengan baik;
3. Renstra 2011 – 2017 belum sepenuhnya terimplementasi;
4. Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
5. Belum dilakukan evaluasi internal terhadap program sehingga tidak dapat diperoleh informasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
6. *Output* dan *outcome* yang dilaporkan belum menyajikan capaian target secara penuh dengan perbandingan tahun sebelumnya dan informasi yang disajikan belum dapat diandalkan .

Namun demikian sesuai dengan hasil tersebut maka capaian kinerja indikator nilai SAKIP dapat terpenuhi 80,49 % yaitu memperoleh predikat CC (Cukup Baik). Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

1. Pendokumentasian dokumen SAKIP dilakukan secara baik dengan penyimpanan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
2. Melakukan perbaikan dokumen yang belum sesuai atau memerlukan perbaikan pada beberapa uraian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya maka indikator kinerja ini dikategorikan efisien karena capaian indikator sama dengan persentase penggunaan dana. Hal serupa juga berlaku pada penggunaan sumber daya manusia yang secara optimal dilakukan oleh seluruh aparat Kecamatan Pandanarum guna mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berupa program dan kegiatan yang dilakukan menghasilkan output yang mendukung pencapaian sasaran. Adapun program tersebut adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas serta penyediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Sasaran 6 :	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
--------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 5 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (tiga) Indikator kinerja, adapun realisasi kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	% Capaian Kinerja 2018
--------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

			2018	2022	terhadap target Renstra
- Nilai survey kepuasan masyarakat	80	83,48	104,4	85	98,21

Nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 83,48 dilakukan pada 50 responden yang masuk dalam kategori mutu pelayanan baik. Hasil survey kepuasan masyarakat sesuai unsur pelayanan disajikan dalam table sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinerja Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,140	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,140	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,080	Baik
4	Biaya / tarif	3,700	Sangat Baik
5	Produk Layanan	3,120	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,200	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,200	Baik
8	Penanganan Pengaduan	3,680	Sangat Baik
9	Kenyamanan tempat layanan	3,220	Baik
10	Fasilitas Tempat Tunggu	3,860	Sangat Baik
11	Penyediaan sarana media informasi	3,760	Sangat Baik
	Nilai IKM	83,48	Sangat Baik

Dari hasil survey terhadap 11 (Sebelas belas) unsur pelayanan tersebut rata-rata mempunyai nilai Baik namun masih ada yang perlu ditingkatkan pada unsur waktu pelayanan.

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Capaian kinerja diatas apabila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018
Nilai survey Kepuasan Masyarakat	80,28	81,27	81,06	83,48

Keberhasilan capaian kinerja didukung antara lain :

Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan salah satu unsur pelayanan yang nilainya rendah yaitu tentang waktu pelayanan yang lama itu dari pelayanan KTP dan KK disebabkan karena jaringan internet di Kecamatan Pandanarum yang tidak bagus dan banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tidak sabar untuk antri.

Analisis Efisiensi Penggunaan sumber daya keuangan

Anggaran untuk pencapaian sasaran 5 adalah sebesar Rp. **237.719.000,-** atau 93,06% dari total pagu anggaran sebesar Rp.255.450.000,-

Hal ini berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 17.730.622,- atau Rp. 6,94%.

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Program/Kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indicator kinerja Nilai survey Kepuasan Masyarakat adalah dilaksanakan Program Pelayanan Admimistrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian Kinerja akuntabilitas bidang keuangan Kecamatan Pandanarum pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Kecamatan Pandanarum pada Tahun 2018 mendapat anggaran Rp.1.239.833.000,- Belanja Tidak Langsung Sedangkan Belanja Langsung Rp. 334.296.000,- dan setelah mengalami revisi-revisi melalui APBD Perubahan menjadi Rp.1.394.129.900 Belanja Tidak Langsung atau mengalami peningkatan 21,89% sedangkan Belanja Langsung Rp. 361.318.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 11,52 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 110.961.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 230.357.000,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 20.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER. 31 DESEMBER 2018 SKPD KECAMATAN PANDANARUM

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	10.000.000	100
		Program Penataan Adminstrasi Kependudukan	10.000.000	9.869.500	98,70



2	Meningkatnya jumlah PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	30.868.000	30.868.000	100
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	255.450.000	237.719.378	93,06
4	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
5	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000	38.903.884	77,81
6	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	5.000.000	5.000.000	100
			361.318.000	332.360.762	91,99

Dilihat dari realisasi anggaran, untuk Belanja Langsung penyerapan anggaran Tahun 2018 mencapai 91,99%, atau anggaran sebesar Rp. 361.318.000,- realisasi sebesar Rp. 332.360.762,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.28.957.238,- atau 8,01 %.

Sisa anggaran pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 17.730.622,- dengan rincian Rp. 19.622,- sisa anggaran belanja listrik, Rp. 5.950.000,- honor PPKom tidak diambil, Rp. 8.867.000,- sisa anggaran belanja perjalanan dinas, Rp. 2.160.000,- dan sisa anggaran upah THL, Rp.734.000,- Sisa honorarium yang tidak diambil kegiatan pemberdayaan kecamatan.

Sisa anggaran pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 11.096.116 disebabkan sisa anggaran kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor belanja honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Rp. 50.000,-, dan sisa anggaran pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor sisa belanja surat tanda nomor kendaraan, belanja suku cadang, belanja service kendaraan dan belanja oli kendaraan dinas Rp. 11.046.116,-

Sisa anggaran pada program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 130.500,- disebabkan sisa anggaran kegiatan peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 130.500,-.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pandanarum merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 dan merupakan bentuk perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun secara sistematis yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam penggunaan dana.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandanarum, dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan tugas serta pencapaian hasil kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan uraian dan data pada Akuntabilitas Kinerja yang didalamnya memuat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dapat mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dari keenam (6) sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN dengan indikator Kinerja Persentase Usaha yang berijin ditargetkan 7 %, realisasinya 12,46% dan Persentase Non Perijinan yang terlayani targetnya 100% realisasinya 289,76 %.
2. Sasaran meningkatnya jumlah PAD dengan indikator kinerja persentase pelunasan PBB, sudah memenuhi target Kinerja yaitu 100 % (Seratus Persen) capaian dari indikator kinerja tersebut didukung beberapa faktor yaitu :
 - a. Tim Intensifikasi PBB Kecamatan Pandanarum secara proaktif melakukan jemput bola untuk melakukan penagihan pajak ke desa-desa;
 - b. Tim Pemungut di tingkat Desa secara intensif melakukan penagihan ke wilayahnya masing-masing;
 - c. Data SPPT yang keliru, tidak berobyek sudah banyak yang dilakukan koreksi atau perubahan

- d. Kecamatan Pandanarum memperoleh Juara 2 tercepat lunas pajak Nilai Rp.750.000.00,-
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan indikator kinerja:
 - a. Target Indikator Kinerja 75 % dengan realisasi kinerja 87,5 % dari 8 Desa sudah 7 Desa yang telah mendirikan BUMDesa yaitu Desa Beji, Desa Pringamba, Desa Lawen, Desa Sirongge, Desa Pandanarum, Desa Pasegeran dan Desa Sinduaji.
 - b. Target Indikator Kinerja 7% dengan realisasi 13,73% dari target pembangunan 80 rumah terealisasi 157 rumah;
 - c. Target Indikator Kinerja 5% dengan realisasi 6,25% dari target 80 jamban sehat terealisasi 100 jamban sehat.
4. Sasaran Strategis meningkatnya tertib adminisitrasi desa dengan indikator Kinerja Persentase Desa Tertib administrasinya ditargetkan 100% dan realisasinya 100% Target pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah memenuhi target 100%.
5. Sasaram Strategis terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja nilai SAKIP. Target kinerja tahun 2018 diharapkan memperoleh nilai B dan hasil evaluasi dokumen SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, Nilai SAKIP Kecamatan Pandanarum adalah CC.
6. Sasaran Strategis meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dengan target kinerja mendapatkan skor atau nilai 80 dari survey kepuasan masyarakat. Hasil dari nilai survey kepuasan masyarakat, diperoleh nilai 83,48 .
Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Pandanarum untuk memenuhi target kinerja tersebut :

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Pandanarum di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN dan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang IMB,HO,IUMK dan Perijinan lainnya.
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP

5. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (IKU, Renstra dan PK) serta pelaksanaan pengukuran kinerja yang terdokumentasi dengan baik dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP.
6. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
7. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pandanarum Tahun 2018 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Pandanarum, Januari 2019.
CAMAT PANDANARUM,

BARIJADI DJUMPAEDO,S.Sos
Pembina Tk. 1
NIP. 19680105 199803 1 006



LAMPIRAN

